

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura  
Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2021



**Jalan Otonom No. 09 Kotaraja Jayapura**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kota Jayapura, 30 September 2021

Kepala Balai,



**Nuhlis Natsir**

NIP. 197505302001121003

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA**

Jl. Otonom Nomor 09 Jayapura – Papua 99225 Telp. (0967) 5186897 Fax. (0967)5187019  
Website : [www.jayapura.karantina.pertanian.go.id](http://www.jayapura.karantina.pertanian.go.id); e-mail : [bkpjura@gmail.com](mailto:bkpjura@gmail.com)

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Jayapura, 30 September 2021

Kepala Balai,



  
**Natsir**

NIP. 197505302001121003

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp557.222.344,00 atau mencapai 131,97% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp422.250.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.332.059.184,00 atau mencapai 71,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.480.513.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2021.

Nilai Aset per 30 September 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp64.915.556.994,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp721.921.708,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp64.057.991.557,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp135.643.729,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 dan Rp64.755.556.994,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar Rp557.222.344,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.128.394.107,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.571.171.763,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-8.545,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.571.180.308,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp62.533.054.462,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.571.180.308,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.793.682.840,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2021 adalah senilai Rp64.755.556.994,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 SEPTEMBER 2021 dan 30 SEPTEMBER 2020**

Uraian	Catatan	30 September 2021			30 September 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	422.250.000,00	557.222.344,00	131,97	520.576.372,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>422.250.000,00</b>	<b>557.222.344,00</b>	<b>131,97</b>	<b>520.576.372,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	3.816.991.000,00	2.966.979.493,00	77,73	2.830.502.240,00
Belanja Barang	B.4.	6.695.141.000,00	4.205.110.139,00	62,81	4.509.579.409,00
Belanja Modal	B.5.	3.968.381.000,00	3.159.969.552,00	79,63	1.975.197.925,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>14.480.513.000,00</b>	<b>10.332.059.184,00</b>	<b>71,35</b>	<b>9.315.279.574,00</b>



## II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA**  
**NERACA**  
**PER 30 SEPTEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	30 September 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	160.000.000,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	561.921.708,00	480.241.644,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>721.921.708,00</b>	<b>480.241.644,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	30.293.108.500,00	30.293.108.500,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11.900.572.628,00	11.164.619.076,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	27.083.851.264,00	27.083.851.264,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4.038.787.100,00	4.038.787.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	2.585.699.500,00	161.683.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-11.844.027.435,00	-10.812.852.475,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>64.057.991.557,00</b>	<b>61.929.196.965,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.3.1.	1.392.186.767,00	1.392.186.767,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-1.256.543.038,00	-1.244.077.432,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>135.643.729,00</b>	<b>148.109.335,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>64.915.556.994,00</b>	<b>62.557.547.944,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	24.493.482,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2.	160.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>160.000.000,00</b>	<b>24.493.482,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>160.000.000,00</b>	<b>24.493.482,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.	64.755.556.994,00	62.533.054.462,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>64.755.556.994,00</b>	<b>62.533.054.462,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>64.915.556.994,00</b>	<b>62.557.547.944,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 dan 30 SEPTEMBER 2020**

Uraian	Catatan	30 September 2021	30 September 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	557.222.344,00	423.986.992,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>557.222.344,00</b>	<b>423.986.992,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	2.966.428.135,00	2.823.598.632,00
Beban Persediaan	D.3.	335.837.331,00	344.677.649,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.190.777.647,00	2.117.812.421,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	621.367.524,00	955.234.900,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	970.342.904,00	986.242.038,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.043.640.566,00	1.038.258.760,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>8.128.394.107,00</b>	<b>8.265.824.400,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-7.571.171.763,00</b>	<b>-7.841.837.408,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	83.245.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	1.481.687.818,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	35.563.868,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	8.545,00	16.244.062,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-8.545,00</b>	<b>-1.379.123.012,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-7.571.180.308,00</b>	<b>-9.220.960.420,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAYAPURA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 dan 30 SEPTEMBER 2020**

Uraian	Catatan	30 September 2021	30 September 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	62.533.054.462,00	64.124.129.711,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-7.571.180.308,00	-9.220.960.420,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	993.588,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	993.588,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	9.793.682.840,00	8.843.430.702,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	2.222.502.532,00	-376.536.130,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>64.755.556.994,00</b>	<b>63.747.593.581,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura

Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Pertanian di Jayapura sebenarnya sudah diawali sejak lama yakni tahun tahun 1877, saat itu fungsi Karantina terfokus pada pengawasan hasil tanaman kopi, semenjak Irian Barat Bergabung dengan Republik Indonesia kegiatan perkarantinaan terus berkembang pada tahun 1970 dinamakan Pos Karantina Tumbuhan Wilayah V Ujung Pandang, hingga pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 171 yang melahirkan Kantor Cabang Karantina Tumbuhan Jayapura, yang kemudian berkembang menjadi Stasiun Karantina Tumbuhan Jayapura pada tahun 1973. Sedangkan kegiatan Karantina Hewan diawali pada tahun 1990 dengan dibentuknya Stasiun Karantina Kehewan Jayapura, yang kemudian berubah menjadi Stasiun Karantina Hewan Sentani pada tahun 1994.

Kedua organisasi tersebut tumbuh dan berkembang menjadi Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura dan Stasiun Karantina Hewan Kelas II Sentani, dengan berkembangnya organisasi dan kegiatan perkarantinaan, maka pada tanggal 3 April 2008 terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menandai peningkatan status dan penggabungan antara Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura dengan Stasiun Karantina Hewan Kelas II Sentani menjadi satu Unit Pelaksana Teknis dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura yang berkedudukan di kota Jayapura.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura pada masa awal memiliki area kerja meliputi Bandar Udara Sentani, Bandara Serui, Bandar Udara Frans Kaisiepo, Pelabuhan Laut Jayapura, Pelabuhan Laut Serui, Pos Perbatasan Skouw dan Kantor Pos Jayapura Dengan di bukanya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak wilayah kerja Balai Karantina Pertanian meliputi Bandar Udara Sentani, Pelabuhan Laut Jayapura, dan Kantor Pos Jayapura.

Seiring perkembangan daerah pemekaran tahun 2015 di buka kantor Wilker Wamena yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalulintas komoditas pertanian ke daerah pegunungan lainnya meliputi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara

## **KEGIATAN PRIORITAS**

1. Penguatan kualitas pelayanan dan operasi perkarantinaan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan dan mensinergikan kebijakan pembangunan daerah;
2. Penguatan kordinasi, kerjasama dan harmonisasi kerja serta publik awarness;
3. Penguatan informasi teknologi;
4. Penguatan laboratorium;
5. Penguatan sarana dan prasarana kerja;
6. Penguatan SDM;
7. Penguatan ketatausahaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan baik.

### **I. TUGAS POKOK**

1. Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) antar area di Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri serta keluar dan tersebarnya HPHK dan OPTK tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan hewani, hayati dan keamanan pangan.

### **II. FUNGSI**

Melaksanakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan (8P) terhadap media pembawa HPHK dan OPTK.

1. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
2. Melaksanakan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
3. Mengelola laboratorium karantina pertanian
4. Mengelola data, informasi serta dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan
5. Memberikan pelayanan teknis operasional perkarantinaan
6. Mengelola tata usaha dan rumah tangga.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	383.100.000,00	383.100.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	39.150.000,00	39.150.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>422.250.000,00</b>	<b>422.250.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.075.974.000,00	3.095.576.000,00
Belanja Lembur	721.415.000,00	721.415.000,00
Belanja Barang Operasional	2.146.228.000,00	2.152.828.000,00
Belanja Barang Non Operasional	338.137.000,00	278.091.000,00
Belanja Barang Persediaan	553.000.000,00	537.000.000,00
Belanja Jasa	880.280.000,00	907.380.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.005.144.000,00	861.496.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.352.985.000,00	1.958.346.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	645.200.000,00	826.953.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.427.700.000,00	3.141.428.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.146.063.000,00</b>	<b>14.480.513.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp557.222.344,00 atau mencapai 131,97% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp422.250.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	3.592.512,00	0,00

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Denda	0,00	307,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	39.150.000,00	57.880.000,00	147,84
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	383.100.000,00	495.749.525,00	129,40
<b>Jumlah</b>	<b>422.250.000,00</b>	<b>557.222.344,00</b>	<b>131,97</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,04% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.592.512,00	86.027.852,00	-95,82
Pendapatan Denda	307,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	57.880.000,00	82.090.000,00	-29,49
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	495.749.525,00	339.114.140,00	46,19
Pendapatan Lain-Lain	0,00	13.344.380,00	- 100,00
<b>Jumlah</b>	<b>557.222.344,00</b>	<b>520.576.372,00</b>	<b>7,04</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.332.059.184,00 atau 71,35% dari anggaran belanja sebesar Rp14.480.513.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
30 September 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	3.816.991.000,00	2.967.884.893,00	77,75
Belanja Barang	6.695.141.000,00	4.205.110.139,00	62,81

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Modal	3.968.381.000,00	3.159.969.552,00	79,63
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>14.480.513.000,00</b>	<b>10.332.964.584,00</b>	<b>71,36</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-905.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>14.480.513.000,00</b>	<b>10.332.059.184,00</b>	<b>71,35</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,92% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Dikarenakan adanya percepatan jadwal palang kegiatan yang di majukan dari jadwal semula
2. Dikarenakan adanya percepatan sumber dana jenis PNBPN terpusat yang tidak lagi melihat capaian realisasi pendapatan
3. Dikarenakan adanya percepatan yang optimal pada jenis belanja modal yang telah banyak terealisasi

Perbandingan Realisasi Belanja  
30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	.%
Belanja Pegawai	2.966.979.493,00	2.830.502.240,00	4,82
Belanja Barang	4.205.110.139,00	4.509.579.409,00	-6,75
Belanja Modal	3.159.969.552,00	1.975.197.925,00	59,98
<b>Total Belanja</b>	<b>10.332.059.184,00</b>	<b>9.315.279.574,00</b>	<b>10,92</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.966.979.493,00 dan Rp2.830.502.240,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,82% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan adanya penambahan pegawai sebanyak 2 orang CPNS Tahun 2021
2. Dikarenakan adanya kenaikan dalam tunjangan jabatan dalam jabatan fungsional teknis dan fungsional keuangan

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.468.712.893,00	2.377.387.816,00	3,84
Belanja Lembur	499.172.000,00	453.445.000,00	10,08
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.967.884.893,00</b>	<b>2.830.832.816,00</b>	<b>4,84</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-905.400,00</b>	<b>-330.576,00</b>	<b>173,89</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.966.979.493,00</b>	<b>2.830.502.240,00</b>	<b>4,82</b>

**B.4. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.205.110.139,00 dan Rp4.509.579.409,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar -6,75% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan belum optimalnya realisasi kegiatan pada akun teknis yang belum dilaksanakan
2. Dikarenakan terdapat pembatasan kegiatan yang mengundang kehadiran instansi terkait

Perbandingan Belanja Barang  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.620.025.000,00	1.509.126.756,00	7,35
Belanja Barang Non Operasional	145.841.700,00	146.087.832,00	-0,17
Belanja Barang Persediaan	398.679.940,00	424.514.550,00	-6,09
Belanja Jasa	448.853.071,00	490.324.333,00	-8,46
Belanja Pemeliharaan	621.367.524,00	955.234.900,00	-34,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	970.342.904,00	986.242.038,00	-1,61
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.205.110.139,00</b>	<b>4.511.530.409,00</b>	<b>-6,79</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.951.000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.205.110.139,00</b>	<b>4.509.579.409,00</b>	<b>-6,75</b>



## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.159.969.552,00 dan Rp1.975.197.925,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 59,98% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan meningkatnya volume dan kuantitas dari tahun sebelumnya
2. Dikarenakan terdapat belanja modal pembangunan fisik kantor wilayah kerja sentani
3. Dikarenakan realisasi belanja modal yang berasal sumber dana PNPB Terpusat tanpa melihat capaian realisasi pendapatan

### Perbandingan Belanja Modal per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	117.592.800,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.953.552,00	522.265.625,00	40,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.424.016.000,00	1.335.339.500,00	81,53
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.159.969.552,00</b>	<b>1.975.197.925,00</b>	<b>59,98</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.159.969.552,00</b>	<b>1.975.197.925,00</b>	<b>59,98</b>

### B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp735.953.552,00 dan Rp522.265.625,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 40,92% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Dikarenakan adanya pembelian unit kendaraan dinas operasional roda 4
2. Dikarenakan adanya pengadaan pembelian alat pengolah data
3. Dikarenakan adanya pengadaan pembelian alat laboratorium KH dan KT

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.953.552,00	522.265.625,00	40,92
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>735.953.552,00</b>	<b>522.265.625,00</b>	<b>40,92</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>735.953.552,00</b>	<b>522.265.625,00</b>	<b>40,92</b>

**B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.424.016.000,00 dan Rp1.335.339.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 81,53% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Dikarenakan adanya pembangunan fisik gedung kantor wilayah kerja sentani
2. Dikarenakan adanya realisasi pembayaran termin 1, termin 2, termin 3 pembangunan fisik gedung kantor wilayah kerja sentani

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.424.016.000,00	1.335.339.500,00	81,53
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.424.016.000,00</b>	<b>1.335.339.500,00</b>	<b>81,53</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.424.016.000,00</b>	<b>1.335.339.500,00</b>	<b>81,53</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021

Uraian	30 September 2021
Uang Muka dari KPPN	160.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>160.000.000,00</b>

#### C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp561.921.708,00 dan Rp480.241.644,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Persediaan per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 September 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	561.921.708,00	480.241.644,00
<b>Jumlah</b>	<b>561.921.708,00</b>	<b>480.241.644,00</b>

### C.2. ASET TETAP

#### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.293.108.500,00 dan Rp30.293.108.500,00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.900.572.628,00 dan Rp11.164.619.076,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>11.164.619.076,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	720.953.552,00
Pengembangan Nilai Aset	15.000.000,00
<b>Saldo per 30 September 2021</b>	<b>11.900.572.628,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2021	-8.023.189.593,00
<b>Nilai Buku per 30 September 2021</b>	<b>3.877.383.035,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Adanya penyusutan nilai buku atas peralatan dan mesin
2. Adanya penghapusan barang peralatan dan mesin melalui lelang

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.083.851.264,00 dan Rp27.083.851.264,00.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.038.787.100,00 dan Rp4.038.787.100,00.

### C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.585.699.500,00 dan Rp161.683.500,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-11.844.027.435,00 dan Rp-10.812.852.475,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.900.572.628,00	-8.023.189.593,00	3.877.383.035,00
2.	Gedung dan Bangunan	27.083.851.264,00	-2.392.483.443,00	24.691.367.821,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.038.787.100,00	-1.428.354.399,00	2.610.432.701,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>43.023.210.992,00</b>	<b>-11.844.027.435,00</b>	<b>31.179.183.557,00</b>

### C.3. ASET LAINNYA

#### C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.392.186.767,00 dan Rp1.392.186.767,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura serta dalam proses penghapusan dari BMN.

#### C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1.256.543.038,00 dan Rp-1.244.077.432,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1.392.186.767,00	-1.256.543.038,00	135.643.729,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>1.392.186.767,00</b>	<b>-1.256.543.038,00</b>	<b>135.643.729,00</b>

#### C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp24.493.482,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 September 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	551.358,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	23.942.124,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>24.493.482,00</b>

##### C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### C.5. EKUITAS

##### C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp64.755.556.994,00 dan Rp62.533.054.462,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp557.222.344,00 dan Rp423.986.992,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Lainnya	307,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	495.749.525,00	339.114.140,00	46,19
Pendapatan Jasa Lainnya	57.880.000,00	82.090.000,00	-29,49
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.592.512,00	2.782.852,00	29,09
<b>Jumlah</b>	<b>557.222.344,00</b>	<b>423.986.992,00</b>	<b>31,42</b>

Penjelasan atas uraian pendapatan yang tersaji pada tabel diatas sebagai berikut :

1. Pendapatan Denda lainnya senilai 307 rupiah di karenakan terlambat dalam melakukan setoran PNBP adanya pemadaman jaringan internet se kota jayapura
2. Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan mengalami kenaikan sebesar 46,19% dikarenakan kenaikan insensitas pengiriman lalu lintas media pertanian dari maupun ke kota jayapura dibading dengan tahun sebelumnya
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 29,09% dikarenakan adanya penambahan pendapatan pada sewa rumah dinas pegawai

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.966.428.135,00 dan Rp2.823.598.632,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.593.516.340,00	1.545.807.180,00	3,09
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.324,00	26.288,00	11,55
Beban Tunj. Anak PNS	24.471.232,00	23.530.326,00	4,00
Beban Tunj. Beras PNS	87.555.780,00	69.305.940,00	26,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	224.169.600,00	160.320.000,00	39,83
Beban Tunj. PPh PNS	5.357.209,00	4.858.446,00	10,27
Beban Tunj. Struktural PNS	23.040.000,00	33.840.000,00	-31,91
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	86.620.650,00	88.908.452,00	-2,57
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	178.970.000,00	176.110.000,00	1,62
Beban Tunjangan Umum PNS	13.965.000,00	31.900.000,00	-56,22
Beban Uang Lembur	499.172.000,00	453.445.000,00	10,08
Beban Uang Makan PNS	229.561.000,00	235.547.000,00	-2,54
<b>Jumlah</b>	<b>2.966.428.135,00</b>	<b>2.823.598.632,00</b>	<b>5,06</b>

Penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan pada beban gaji di karenakan terdapat penambahan pegawai sebanyak 2 orang CPNS (1 POPT dan 1 Administrasi)
2. Adanya kenaikan tunjangan PNS sesuai dengan perpres terbaru dari fungsional teknis dan fungsional keuangan

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp335.837.331,00 dan Rp344.677.649,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Beban Persediaan  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	335.837.331,00	344.677.649,00	-2,56
<b>Jumlah</b>	<b>335.837.331,00</b>	<b>344.677.649,00</b>	<b>-2,56</b>

Penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas, sebagai berikut :

1. Beban persediaan konsumsi mengalami penurunan sebesar 2,56 persen dikarenakan belum optimalnya dalam melakukan pembelian persediaan konsumsi.

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.190.777.647,00 dan Rp2.117.812.421,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	98.321.200,00	98.409.832,00	-0,09
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20.220.500,00	278.000,00	7.173,56
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.275.500,00	48.803.471,00	-56,41
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133.920.000,00	144.190.000,00	-7,12
Beban Honor Output Kegiatan	27.300.000,00	47.400.000,00	-42,41
Beban Jasa Lainnya	58.360.000,00	84.898.500,00	-31,26
Beban Jasa Profesi	2.900.000,00	10.400.000,00	-72,12
Beban Keperluan Perkantoran	1.210.720.000,00	1.136.386.530,00	6,54
Beban Langganan Air	4.283.100,00	2.125.350,00	101,52
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	38.323.600,00	33.451.616,00	14,56
Beban Langganan Listrik	141.703.127,00	156.447.913,00	-9,42
Beban Langganan Telepon	6.739.320,00	8.165.880,00	-17,47
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	232.650.000,00	171.557.000,00	35,61

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.459.500,00	6.238.755,00	243,97
Beban Sewa	172.601.800,00	169.059.574,00	2,10
<b>Jumlah</b>	<b>2.190.777.647,00</b>	<b>2.117.812.421,00</b>	<b>3,45</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp621.367.524,00 dan Rp955.234.900,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122.856.000,00	459.728.450,00	-73,28
Beban Pemeliharaan Jaringan	48.450.100,00	25.277.200,00	91,68
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.061.424,00	470.229.250,00	-4,29
<b>Jumlah</b>	<b>621.367.524,00</b>	<b>955.234.900,00</b>	<b>-34,95</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp970.342.904,00 dan Rp986.242.038,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	755.192.086,00	252.293.189,00	199,33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.350.000,00	140.900.000,00	-63,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	60.192.800,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	90.320.818,00	437.156.049,00	-79,34
Beban Perjalanan Tetap	73.480.000,00	95.700.000,00	-23,22
<b>Jumlah</b>	<b>970.342.904,00</b>	<b>986.242.038,00</b>	<b>-1,61</b>

**D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.043.640.566,00 dan Rp1.038.258.760,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	292.573.828,00	312.449.345,00	-6,36
Beban Penyusutan Irigasi	3.034.693,00	3.034.693,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	85.021.217,00	85.021.217,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	74.282.025,00	91.580.217,00	-18,89
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12.465.606,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	576.263.197,00	546.173.288,00	5,51
<b>Jumlah</b>	<b>1.043.640.566,00</b>	<b>1.038.258.760,00</b>	<b>0,52</b>

#### D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 30 September 2021 dan 30 September 2020

Uraian	Realisasi 30 September 2021	Realisasi 30 September 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-1.481.687.818,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-16.244.062,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-8.545,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	25.775.488,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	83.245.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	9.788.380,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>-8.545,00</b>	<b>-1.379.123.012,00</b>	<b>-100,00</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp62.533.054.462,00 dan Rp64.124.129.711,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah sebesar Rp-7.571.180.308,00 dan Rp-9.220.960.420,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp993.588,00.

#### E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp993.588,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.793.682.840,00 dan Rp8.843.430.702,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 September 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 September 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.332.059.184,00
Diterima dari Entitas Lain	-557.222.344,00
Transfer Masuk	18.846.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.793.682.840,00</b>

#### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 September 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-557.222.344,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.332.059.184,00.

#### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar Rp18.846.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 30 September 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	18.846.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>18.846.000,00</b>

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 September 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.222.502.532,00 dan Rp-376.536.130,00.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

**F.2. Pengungkapan Lain-lain**